

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan salah satu organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Saputra & Widiyarta, 2021). Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah menjelaskan bahwa inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inovasi merupakan sebuah keberhasilan dalam aspek ekonomi dan sosial yang dicapai melalui penerapan metode baru atau melalui kombinasi metode lama secara inovatif dalam proses transformasi input menjadi output. Inovasi tersebut mampu menghasilkan perubahan mendasar dalam relasi antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen, komunitas, masyarakat maupun lingkungan. Dengan demikian, inovasi menjadi elemen yang strategis dalam pengembangan wilayah dan peningkatan daya saing daerah. Daya saing pada suatu daerah menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah (Hutagalung & Hermawan, 2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 menyebutkan bahwasanya sasaran dari inovasi daerah tersebut diarahkan kepada percepatan perwujudan

kesejahteraan masyarakat dengan melalui cara peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Tabel 1. 1 Peningkatan Jumlah Partisipasi dan Jumlah Inovasi Daerah Sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2023 di Indonesia

Tahun	Tingkat Partisipasi		Jumlah Inovasi Daerah	
	Jumlah	Presentase Perkembangan	Jumlah	Presentase Perkembangan
2017	-	-	576	-
2018	188	-	3.718	+545%
2019	260	+38%	8.016	+116%
2020	484	+86%	17.779	+122%
2021	519	+7,2%	25.124	+41,3%
2022	510	-1,7%	26.900	+7,06%
2023	527	+3,3%	28.539	+6,09%

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (diolah peneliti)

Berdasarkan Permohonan Detail Capaian Inovasi pada Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri pada 20 Juni 2024 menyatakan pada tahun 2023 terdapat 28.539 jumlah inovasi daerah yang ada di Indonesia dengan presentase perkembangan 6,09%. Pada **Tabel 1. 1** tersebut menunjukkan adanya peningkatan inovasi daerah di setiap tahunnya.

Tabel 1. 2 Distribusi Inovasi Daerah di Indonesia Tahun 2023

Pulau	Jumlah Pemerintah Daerah	Total Inovasi	Inisiasi	Uji Coba	Penerapan
Jawa	119	11.861	366	383	11.112
Sumatera	164	10.064	469	265	9.330
Kalimantan dan Sulawesi	148	3.934	211	271	3.452
Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku	67	2.454	283	154	2.017
Papua	48	226	33	7	186

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, 2024 (diolah peneliti)

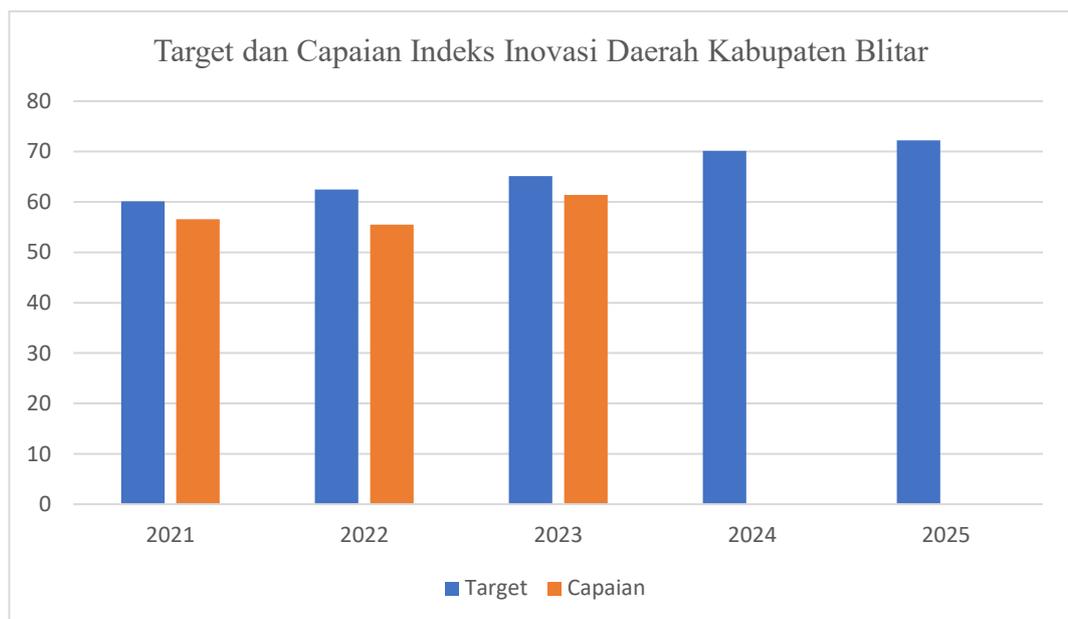
Pendistribusian inovasi daerah di Indonesia pada tahun 2023 mengalami perbedaan yang cukup signifikan di setiap pulau-pulau di Indonesia. Total inovasi paling banyak dilakukan terjadi di Pulau Jawa dengan total 119 Pemerintah Daerah mampu memiliki inovasi sebanyak 11.861 dengan jumlah inovasi inisiasi 366, inovasi uji coba 383, dan inovasi penerapan 11.112. Kemudian, pada Pulau Sumatera yang dengan kepemilikan Pemerintah Daerah sebanyak 164 dengan artinya jumlah kepemilikan Pemerintahan Daerah yang lebih banyak dari Pulau Jawa. Namun memiliki jumlah inovasi sebanyak 10.064 yang berada dibawah Pulau Jawa dengan jumlah inovasi yang masih inisiasi sebanyak 469, inovasi uji coba sebanyak 265, dan inovasi penerapan sebanyak 9.330. Kemudian selanjutnya disusul oleh Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi dengan jumlah inovasi 3.934, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Maluku dengan jumlah inovasi 2.454, dan Pulau Papua dengan jumlah inovasi mencapai 226.

Penilaian inovasi daerah di Indonesia dibedakan menjadi empat predikat, yaitu:

1) daerah sangat inovatif, 2) daerah inovatif, 3) daerah kurang inovatif, dan 4) daerah yang belum melaporkan data inovasi daerah. Provinsi-provinsi yang ada di

Pulau Jawa yang berhasil mendapatkan predikat “Daerah Sangat Inovatif” pada tahun 2023 terdiri dari Provinsi DKI Jakarta dengan skor indeks 80,98, Provinsi Jawa Barat dengan skor indeks 74,77, Provinsi Jawa Timur dengan skor indeks 71,38, dan Provinsi Jawa Tengah dengan skor indeks 65,40.

Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi terbesar di Pulau Jawa berhasil meraih ranking ke-6 (enam) dengan predikat “Sangat Inovatif” pada tahun 2023. Provinsi Jawa Timur menghadirkan 189 inovasi unggulan (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2023). Sebagai salah satu daerah di Jawa Timur, Kabupaten Blitar juga berhasil meraih predikat Kabupaten “Sangat Inovatif” dan meraih ranking ke-32 dari 415 Kabupaten pada tahun 2023.



Gambar 1. 1 Target dan Capaian Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Blitar dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (diolah peneliti)

Target indeks inovasi daerah di Kabupaten Blitar tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blitar pada tahun 2021-2026. Pada setiap tahunnya, Kabupaten Blitar berhasil melaporkan inovasi daerahnya ke Kemendagri. Pada tahun 2021, Kabupaten Blitar berhasil meraih skor indeks 56,58 dengan predikat “Inovatif”.

Sementara itu, pada tahun 2022 Kabupaten Blitar berhasil mendapatkan skor indeks 55,51 dengan predikat “Inovatif”. Kemudian pada tahun 2023, Kabupaten Blitar mampu mendapatkan predikat “Sangat Inovatif” dengan skor indeks yang diperoleh mencapai 61,42. Kabupaten Blitar pada tahun 2023 berhasil melaporkan 39 inovasi daerah yang telah memenuhi syarat-syarat IID, salah satunya yaitu inovasi Republik Melon yang dipelopori oleh Kecamatan Wates. Program inovasi daerah Republik Melon termasuk ke dalam program inovatif yang dikembangkan di Kabupaten Blitar. Inovasi daerah Republik Melon termasuk dalam daftar-daftar inovasi daerah yang ada di Kabupaten Blitar yang tertulis dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Blitar. Republik Melon dibentuk oleh Kecamatan Wates atas dasar permasalahan air yang kurang di Kecamatan Wates karena termasuk ke dalam dataran tinggi. Serta didasarkan pada adanya ketidakadilan yang diterima dan keprihatinan oleh para petani melon yang ada di Kecamatan Wates.

Kecamatan Wates memiliki luas lahan tanah sebesar 80,86 km² dan menjadi salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar yang terletak di ketinggian lebih dari 300 meter dari atas permukaan laut. Kecamatan Wates termasuk ke dalam wilayah Blitar bagian selatan yang dilihat dari segi topografinya maka Kecamatan Wates masih tergolong ke dalam bagian pesisir dan pegunungan berbatu yang memiliki struktur tanah kurang subur dibandingkan dengan daerah Blitar lain (Pemerintah Kabupaten Blitar, 2021).

Tabel 1. 3 Luas Lahan Tanaman di Kecamatan Wates (Hektar)

Jenis tanaman Sayur dan Buah-buahan Semusim	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Wates (Hektar)			
	2023	2022	2021	2020
Cabai Rawit	1.520	1.488	1.400	1.352
Melon	31	32	39	45
Bawang Merah	25	22	109	27
Kacang Panjang	9	22	35	34
Ketimun	10	23	27	28
Cabai Besar	4	2	7	122
Semangka	-	1	-	1
Kentang	-	-	-	-
Kubis	-	-	-	-
Bawang Putih	-	-	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2024 (diolah peneliti dari yang terbesar ke terkecil)

Kecamatan Wates memiliki berbagai komoditas pertanian yang terdiri dari sayuran dan buah-buahan musiman. Luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan terbesar di Kecamatan Wates didominasi oleh cabai rawit dan kemudian diikuti oleh tanaman buah melon. Luas lahan tanaman melon pertahunnya mengalami penurunan dari tahun 2020 yang awalnya mencapai 45 hektar kini pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 31 hektar. Meskipun mengalami penurunan luas lahan untuk tanaman melon disetiap tahunnya, Kecamatan Wates pada tahun 2023 mampu menduduki luas panen melon terbanyak dibandingkan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar dengan total luas panen mencapai 31 Hektar (Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2024).

Tabel 1. 4 Luas Panen Melon di Seluruh Kabupaten Blitar Tahun 2023

Kecamatan	Luas Panen Melon (hektar) (Ha)	Kecamatan	Luas Panen Melon (hektar) (Ha)	Kecamatan	Luas Panen Melon (hektar) (Ha)
Wates	31,00	Kesamben	-	Kademangan	-
Sutojayan	13,00	Garum	-	Kanigoro	-
Panggungrejo	9,00	Nglegok	-		
Wonodadi	10,00	Talun	-		
Udanawu	10,00	Sanankulon	-		
Gandusari	7,00	Ponggok	-		
Selorejo	2,00	Srengat	-		
Doko	1,00	Bakung	-		
Wlingi	1,00	Wonotirto	-		
Selopuro	1,00	Binangun	-		

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2024 (diolah peneliti dari yang terbesar ke yang terkecil)

Republik Melon Universe, Sistem Manajemen Terpadu Asosiasi Petani Milenial yang Maju, Mandiri, dan Modern secara berkelanjutan merupakan sebuah inovasi daerah yang digagas oleh Kecamatan Wates guna untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan cara berbudidaya tanaman melon dan juga diharapkan dengan adanya inovasi tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga penelitian. Adanya inovasi Republik Melon juga diharapkan dapat memberikan keuntungan berupa kemudahan dalam memproduksi melon dan pengelolaan asosiasi yang akuntabel, transparan, praktis, dan futuristik sehingga dapat memudahkan kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, lembaga penelitian dan institut lainnya.

Pada tahun 2022, Republik Melon sebagai salah satu inovasi daerah di Kabupaten Blitar mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 dengan kategori Inovasi atau Inovasi Teknologi Bidang Ekonomi dengan judul “Republik Melon Universe Sistem Manajemen Terpadu Asosiasi Melon Milenial yang Maju, Mandiri, dan Modern secara Berkelanjutan” pada Lomba Kreativitas, Inovasi dan

Teknologi (KRENOTEK) Kabupaten Blitar yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar (Republik Melon, 2024).

Inovasi Republik Melon dapat mencerminkan adanya semangat dari petani muda yang ada di Kecamatan Wates yang terus berinovasi dan membawa perubahan besar dalam sektor pertanian di Kecamatan Wates. Salah satu inovasi yang ada dalam program tersebut yaitu adanya pembangunan *greenhouse* yang digunakan dalam mengatasi kekeringan dan menjaga kualitas dari hasil pertanian. Upaya yang dilakukan tersebut dinilai telah berhasil dan sukses dalam membudidayakan melon, bahkan hasil pertanian melon yang ada di Kecamatan Wates telah mampu memenuhi permintaan pasar di Blitar dan sekitarnya. Sehingga dari keberhasilan tersebut, maka dapat membuat peluang bagi berbagai pihak agar dapat bergabung dalam komunitas Republik Melon (Muhaimin, 2025).

Republik Melon sebagai salah satu inovasi daerah di Pemerintahan Kecamatan Wates tersebut dibentuk dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani melon yang ada di Kecamatan Wates. Permasalahan yang ditemukan dalam program inovasi daerah Republik Melon di Kecamatan Wates yang disampaikan langsung oleh anggota BPP Kecamatan Wates yang sekaligus menjadi inovator program ini menyatakan bahwasanya terdapat masalah dalam keterlibatan partisipasi petani melon dalam program Republik Melon di Kecamatan Wates.

“Republik melon sebagai inovasi baru yang menjadi wadah asosiasi petani melon juga mengalami permasalahan utama dalam kurang ketertarikan petani melon dalam inovasi republik melon. Kecamatan Wates kurang lebih memiliki 150 petani melon dan masing-masing petani juga memiliki PL masing-masing namun dalam keseluruhan hanya terdapat beberapa penggerak saja dan masih menunjukkan kurang ketertarikan dari petani meskipun program Republik

Melon ini sudah terlanjur melejit” (Informan Inovator Republik Melon sekaligus anggota BPP Kecamatan Wates, 2024).

Tabel 1. 5 Data Petani Melon di Wilayah BPP Kecamatan Wates

No	Desa	Petani Melon
1	Mojorejo	44
2	Sukorejo	37
3	Ringinrejo	24
4	Wates	24
5	Tugurejo	11
6	Purworejo	5
7	Sumberarum	1
8	Tulungrejo	3
	Total	149

Sumber : Data BPP Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, 2024 (diolah peneliti dari yang terbesar sampai terkecil)

Berdasarkan data yang ditampilkan tersebut setidaknya terdapat 149 petani melon di wilayah BPP Kecamatan Wates tahun 2023. Namun, didasarkan pada hasil wawancara dengan pegawai BPP Kecamatan Wates yang sekaligus inovator Republik Melon dan didukung oleh data dari daftar anggota kelompok tani Republik Melon menyatakan bahwasanya secara keseluruhan tidak semua petani melon tersebut terlibat dalam program inovasi Republik Melon.

Tabel 1. 6 Anggota Kelompok Tani Republik Melon Kecamatan Wates Kabupaten Blitar

No	Desa	Kecamatan	Jumlah Petani	Status Keanggotaan
1	Sukorejo	Wates	4	Anggota
2	Wates	Wates	4	Anggota
3	Mojorejo	Wates	3	Anggota
4	Tulungrejo	Wates	1	Anggota
5	Kaligambir	Panggungrejo	2	Anggota

Sumber : Data BPP Kecamatan Wates, 2024 (diolah peneliti)

Berdasarkan data yang ada hanya terdapat 14 anggota yang terlibat dalam kelompok tani Republik Melon. Meskipun demikian, anggota petani melon yang tidak aktif dalam program inovasi Republik Melon tetap dirangkul tanpa dibedakan. Kurangnya keterlibatan petani melon dalam program inovasi daerah

Republik Melon menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan terutama dalam proses pengembangan program. Hal tersebut dikarenakan dengan keterlibatan peran dari masyarakat dapat menentukan keberhasilan program. Sehingga, Republik Melon ini merupakan salah satu program yang dapat disesuaikan dengan teori *Co-production*.

Co-production atau yang dapat disebut dengan kolaborasi produksi bersama merupakan sebuah proses pemberian layanan baik yang mana pemerintah dan masyarakat dapat bertanggungjawab bersama (Asmoro & Imron, 2019). Konsep *co-production* juga dapat dimaknai sebagai “*the concept of co-production emerged as an effort to improve the quality of public services for the community*” yaitu konsep produksi bersama muncul sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat (Irkham et al., 2019). Perikangas et al., (2024) menyatakan bahwasanya “*co-production entails the idea of a community, a network, an ecosystem, a platform and/or an organization*”, *co-production* tersebut memerlukan sebuah gagasan tentang komunitas, jaringan, ekosistem, platform dan atau organisasi.

Co-Production seringkali dimaknai sebagai campuran dari tindakan individu dan kolektif yang keduanya dapat meningkatkan inovasi sosial dengan cara yang berbeda. Asumsi utama dalam *co-production* yaitu untuk mengatasi masalah yang kompleks, keahlian ilmiah saja tidak cukup dan kontribusi pengetahuan pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan pengetahuan yang tidak hanya berkualitas ilmiah tetapi juga kuat secara sosial (Turnhout et al., 2020).

Co-production memiliki peluang untuk melibatkan masyarakat yang kurang beruntung dalam proses pengembangan dan penyampaian layanan (Eriksson,

2022). Inovasi sosial menjadi bagian dari proses *co-production* yang menawarkan kesempatan untuk mempelajari prinsip dan elemen yang menjadi inti dari produksi inovasi sosial (Perikangas et al., 2024). Inovasi sosial dapat dilihat sebagai bagian dari proses *co-production* dimana perubahan dicapai melalui kolaborasi, yang mengarah pada ide-ide baru, pemberdayaan bagi para aktor, dan terakhir yaitu dampak sosial (Perikangas et al., 2024).

Inovasi sosial memiliki empat pendekatan yaitu model manajemen organisasi, kewirausahaan sosial, pengembangan produk atau jasa baru, dan model pemberdayaan dan peningkatan kapasitas (F. M. Widhagda & Anantanyu, 2022). Hulgard (2010) menyatakan bahwa kewirausahaan sosial adalah proses menciptakan nilai sosial melalui kerja sama antara individu dan kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam inovasi sosial (Darwis et al., 2022). Tujuan dari kewirausahaan sosial yakni untuk dapat menyelesaikan masalah sosial, mengembangkan potensi masyarakat, serta memenuhi kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Inovasi sosial dapat mencakup pengembangan solusi yang kreatif dan berkelanjutan sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan dan memperbaiki permasalahan sosial, lingkungan, ataupun permasalahan kemanusiaan (Sunarjo, 2024). Inovasi sosial memiliki tujuan dalam penciptaan nilai sosial dan lingkungan yang positif.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Irkham et al. (2019) yang berjudul “*Application of Co-Production in Waste Management Through Waste Banks Program in Batu City*” penelitian tersebut mendapati hasil bahwasanya masih ditemukannya beberapa kendala dalam penerapan Co-Production dalam program pengelolaan sampah di Kota Batu. Kendala tersebut berasal dari keterbatasan

sumber daya finansial dan fasilitas pendukung, menurunnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif, dan diperlukannya sebuah pengelolaan yang lebih inovatif.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhan & Juwono (2021) dengan judul “*Citizen’s Participation as Co-Producer in Licensing*” penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwasanya partisipasi masyarakat sebagai *co-producer* dalam program inovasi perizinan dari DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat melalui peran aktif atau keterlibatan masyarakat, motivasi masyarakat dalam mengikuti program penyedia layanan secara sukarela dan penciptaan nilai publik atau nilai privat dalam hasil dan dampak yang ada kegiatan tersebut. Selain itu, pencapaian manfaat sosial juga dapat dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan penilaian akhir.

Berdasarkan penelitian dari Perikangas et al. (2024) yang berjudul “*Co-production of social innovations and enabling ecosystems for social enterprises*” penelitian tersebut mendapati hasil bahwasanya pemerintah diharuskan memiliki pola pikir yang terbuka terkait dengan mulai menciptakan ekosistem yang memungkinkan bagi adanya *social enterprise*. Platform digital bersama dan alat dalam *co-production* merupakan sebuah tempat dan ruang konkret yang dapat dibangun untuk menciptakan peluang kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan yang berbeda.

Berdasarkan penelitian dari Zai & Wardiyanto (2024) yang berjudul “Analisis Inovasi Warak Ngendog dalam Perspektif *New Public Governance*” penelitian tersebut mendapati hasil bahwasanya dalam program inovasi tersebut melibatkan beberapa kolaborasi aktor dalam pelaksanaannya. Masyarakat yang terlibat dalam

kinerja aktual pada kegiatan *co-production* yaitu seperti terlibat secara langsung dalam pemasaran produk yang dibuat bersama dan mendistribusikan program inovasi ini kepada masyarakat luas. Penelitian mendukung lainnya dari Harmawan et al. (2022) yang berjudul “*Collective Leadership in Co-Production Process in Response to Covid-19 in Surabaya: The Case of Kampung Tangguh Jogo Suroboyo*” tersebut mendapati hasil bahwasanya dalam sebuah program diperlukan sebuah peran dari berbagai aktor dalam proses *co-production* terutama dalam membangun kepemimpinan yang kolektif.

Penelitian ini berfokuskan kepada pengembangan program inovasi daerah Republik Melon di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar sebagai perwujudan kegiatan yang berbasis kolaboratif dan partisipatif masyarakat dengan berbasis *co-production* dengan menggunakan pendekatan *Social Innovation Pathways and Drawing The Link to Co-Production* yang dikemukakan oleh Ayob et al., (2016) yang mengklasifikasikan beberapa parameter yang digunakan dalam istilah *co-production* antara lain yaitu parameter *Collaboration* (kolaborasi), kolaborasi yang ada mencakup beberapa *stakeholders* diantaranya yaitu;

- 1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar,
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar;
- 3) Pemerintah Kecamatan Wates;
- 4) BPP Kecamatan Wates;
- 5) Petani Melon di Republik Melon Kecamatan Wates;
- 6) Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates;
- 7) UMKM Desa Tugurejo.

New Ideas (generasi ide-ide baru), yaitu terkait dengan inovasi lanjutan yang ada dalam Republik Melon. *Empowerment* (pemberdayaan), yaitu terkait dengan pemberdayaan dan bimbingan-bimbingan yang diberikan kepada petani melon. *Change* (perubahan), yaitu yang mengarah kepada perubahan dalam sosial. Penelitian ini terbatas hanya pada pengembangan program inovasi daerah “Republik Melon” dengan menggunakan pendekatan *co-production* dan ekosistem pendukung *social enterprise* dalam proses *co-production* dengan komponen yang sudah disebutkan tersebut dan disesuaikan dengan kondisi lapang. Keterbaharuan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya keterlibatan proses *co-production* dalam sebuah inovasi sosial.

Dengan demikian berdasarkan dengan latar belakang permasalahan dan didukung oleh penelitian terdahulu tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan *Co-Production* dalam Pengembangan Program Inovasi “Republik Melon” di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk keterlibatan petani melon dalam perspektif *co-production*, serta perubahan yang mengarah pada kemanfaatan sosial pada masyarakat petani melon pada inovasi daerah Republik Melon di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka dapat diketahui bahwasanya tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk keterlibatan petani melon dalam perspektif *co-production*, serta perubahan yang mengarah pada kemanfaatan sosial pada masyarakat petani melon pada inovasi daerah Republik Melon di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermaksud dapat menyumbangkan pemahaman ilmiah mengenai pengembangan program inovasi daerah “Republik Melon” di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar dengan berbasis *co-production*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta menjadi acuan dalam penelitian sejenis.